

## **ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SORONG**

**Berti Pakaila dan Samuel Yohanes Warella**

Universitas Victory Sorong

bertipakaila@unvicsorong.ac.id dan samuel.warella@gmail.com

### ***ABSTRACT***

*A Region can be called autonomous if the region can finance the implementation of its own household affairs. If an autonomous region has not been able to fully finance its own household affairs, then at least the region must determine its routine expenditures with regional revenue. The formulation of the problem in this paper is how the system and procedures for collecting parking fees are managed by the Regional Revenue Agency or Sub-Department of Retribution in order to increase Sorong City's Original Revenue. The method used in Analyzing the data is qualitative Analysis. Based on the result of the study, it can be concluded that there is no application of good systems and procedures from the Sorong City Regional Revenue Agency in collecting retribution fee. This often causes the collecting system in parking area to be ineffective.*

**Keywords:** *Regional Autonomy, Financial and Social Factors, Parking Retribution Fee, Regional Revenue Agency, Sorong City Original Revenue.*

## **PENDAHULUAN**

Suatu daerah dapat disebut otonomi apabila daerah tersebut dapat membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri. Jika suatu daerah otonomi belum mampu sepenuhnya membiayai urusan rumah tangganya sendiri maka paling tidak daerah tersebut harus mampu menetapkan belanja rutinya dengan pendapatan hasil daerah. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan faktor keuangan merupakan faktor sosial dalam mengatur tingkat kemampuan daerah untuk melaksanakan otonominya. Ini berarti dalam pelanggarannya urusan rumah tangga, daerah membutuhkan dana atau uang. Untuk mengukur alat dan jasa sebagai penukar menduduki posisi paling penting dalam urusan rumah tangga daerah. Keadaan keuangan daerahlah yang sangat menentukan corak, bentuk serta kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan oleh

pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembayaran, dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Sistem dan prosedur pemungutan retribusi parkir di Pemerintah Kota Sorong dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kota melakukan sistem kerja yang diantaranya : Melakukan pungutan retribusi secara khusus yaitu yang dipungut langsung oleh petugas harian Badan pendapatan Daerah, yang ditugaskan oleh Ka Subdin Retribusi sebagai berikut : Petugas harian melakukan tugas pungutan mulai dari jam 08.00 wit pagi sampai dengan jam 12.00 WIT dan cara petugas pungutan retribusi yang bertugas jam 08.00 WIT menyetor jam 12.00 WIT ke bagian penagihan dan pencatatan Sub Badan Retribusi. Melakukan pungutan retribusi dengan cara bagi hasil yaitu yang dilakukan oleh pengelola wilayah contoh dari pungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh pengelola wilayah yaitu lokasi parkir an saga supermarket, lokasi parkir an Supermarket Yohan dan Supermarket Papua. Dengan cara kerja pungutan retribusi parkir sebagai pengelola wilayah menugaskan petugas pungutan retribusi parkir yang berdomisili disekitar wilayah/tempat lokasi pengelola pada pengelola wilayah ini didistribusikan karcis dari Badan pendapatan Daerah/ Sub Badan Retribusi bagian penagihan dan pencatatan setiap bulan / per bulan disetor sesuai dengan jumlah karcis yang digunakan atau terpakai dengan sistem bagi hasil yaitu 40% disetor ke Badan Pendapatan daerah Sub Badan Retribusi bagian penagihan dan pencatatan dan pembagian 60% milik pengelola wilayah. Suatu daerah yang otonomi itu dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kegiatan atau aktifitas daerahnya. Pemerintah daerah harus menyiapkan biaya atau dana untuk kegiatan-kegiatan dimaksud oleh sebab itu untuk memperoleh dana Badan pendapatan daerah melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan dana atau uang yaitu salah satu pungutan retribusi parkir.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Sistem dan Prosedur**

Sistem informasi menurut A. Leitch dan K. Roscoe Davis adalah sebagai berikut : Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan pengelolaan transaksi harian, mendukung kegiatan operasi sehari-hari, bersifat manajerial dan kegiatan suatu organisasi dan menyediakan pihak-pihak tertentu dengan laporan yang diperlukan. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi menurut Bodnard dan Hopwood (2000 : 23) Sistem Informasi Akuntansi adalah kumpulan sumber daya manusia dan peralatan yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi. Menurut

Gordon B. Davis (1998 : 15) sebuah sistem informasi mempunyai subsistem-subsistem fisik berupa perangkat computer, perangkat lunak (yang terdiri dari perangkat lunak sistem umum, perangkat lunak terapan umum dan program aplikasi), prosedur dan manusia (petugas pengoperasiannya). Pengertian sistem informasi menurut Joseph W. Wilkinson dalam buku “Sistem Akuntansi dan Informasi” yang diterjemahkan oleh Agus Maulana (1993 : 3) adalah sebagai berikut : sistem ini mengkoordinasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Pengertian sistem informasi menurut Josep W. Wilkinson (1993 : 4) adalah : sistem informasi adalah suatu kerangka kerja dengan mana sumber daya (manusia, komputer) dikoordinasikan untuk mengubah masukan (data) menjadi keluaran (informasi) guna mencapai sasaran. Menurut Joseph W. Wilkinson (1997 : 60) Sistem Informasi Akuntansi merupakan system informasi formal yang mengandung karakteristik meliputi tujuan (kegunaa), tahap-tahap pengguna dan sumber daya. Sistem menekan pada prosedur menurut Jerry Fitzera,et.al adalah suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Sistem menekan pada elemen : sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Ciri-ciri sistem untuk membedakan sistem dapat dilakukan dengan pendekatan karakteristik yang melekat pada suatu sistem.

### **Pengendalian Intern**

Pengendalian intern didefinisikan oleh AICPA (American Institute Of Certified Public Accountants) sebagai berikut : Pengendalian intern itu meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harga milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi dalam usaha dan membantu mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu. Dalam pengendalian intern di bidang retribusi, khusus retribusi parkir, dalam tugas dan tanggung jawabnya sub dinas retribusi menyiapkan personil atau petugas-petugas lapangan untuk ditempatkan di lokasi parkir dan bagian pencatatan dan penagihan mencatat untuk mengetahui jumlah karcis yang didistribusikan ke lokasi parkir agar dapat diketahui sesuai jumlah karcis dan jumlah rupiahnya (uang). Dari definisi di atas, dapat dikatakan bahwa pengendalian intern merupakan rangkaian tindakan yang menembus selirih organisasi. Selain itu juga untuk memperjelas bahwa pengendalian intern berada dalam proses manajemen dana, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan monitoring. Pengendalian bukanlah suatu yang ditumbuhkan dalam proses manajemen tersebut, tetapi merupakan integral dalam proses tersebut. Jadi dapat dikatakan pengendalian intern adalah aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan pentingnya hasil yang dicapai dari aktivitas yang

direncanakan. Dari penemuan penyimpangan, pihak manajemen dapat mengadakan tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatannya. Ini berarti bahwa pengendalian intern dalam hal tertentu mengakibatkan perubahan rencana awal perusahaan. Pengendalian intern mensyaratkan umpan maju (Feed forward) yaitu bahwa tujuan, rencana, kebijaksanaan, dan standar ditetapkan dan dikomunikasikan kepada para manajer yang bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan. Pengendalian intern didasarkan konsep umpan balik (Feed back) dalam menilai pelaksanaan dan mengusulkan tindakan koreksi untuk menjamin tercapainya tujuan. Prosedur rinci yang digunakan manajemen untuk mengendalikan operasi perusahaan disebut pengendalian intern (internal control). Pada perusahaan kecil, pemilik pengawasi karyawan dan memperhatikan seluk-beluk perusahaan secara pribadi. Namun bagi perusahaan yang jaringan organisasinya semakin luas, menyulitkan manajemen mengendalikan semua tahap operasi perusahaan. Untuk itu dilakukan pengendalian intern.

### **Retribusi Parkir**

Retribusi adalah alat yang digunakan untuk pembayaran (Bea/ongkos) penggunaan fasilitas umum yang dikelola oleh pemerintah daerah setempat. Dari pengertian retribusi maka setiap pengguna fasilitas umum wajib membayar retribusi, khusus kendaraan bermotor baik roda empat dan roda dua yang menggunakan fasilitas atau lokasi-lokasi parkir yang dikelola di suatu daerah tertentu. Pada umumnya retribusi parkir merupakan salah satu pendapatan asli daerah Kota Sorong yang tidak dipisahkan dengan retribusi lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Sorong dalam hal ini Bapenda, yang diatur menurut Peraturan daerah (PERDA). Retribusi parkir diseluruh area kerja Pemerintah Kota Sorong ini sangatlah menunjang kegiatan-kegiatan pemerintah. Dalam sistem pemungutan retribusi parkir, pemerintah daerah kota ditugaskan kepada pemungutan retribusi parkir, pemerintah daerah kota yang ditugaskan kepada Bapenda melakukan sistem kerja.

### **Prosedur Pemungutan Retribusi Parkiran**

Pada prinsipnya Badan pendapatan daerah yang menugaskan kegiatan pemungutan retribusi parkir kepada sub di badan retribusi sangat sarat dengan aturan-aturan yang berlaku. Sub badan retribusi melakukan tugasnya dengan cara : Menyediakan karcis parkir disiapkan untuk petugas lapangan atau pemungut retribusi parkir agar dapat menyerah kepada pengguna kendaraan yang memanfaatkan area/halaman parker. Karcis itu bervariasi biasanya 1 bulan itu bisa 20-30 blok dibagi 2 jadi yang roda 2 itu 30 blok sedangkan yang roda 4 itu 10 blok kemudian dari hasil yang dibagi itu sesuai kesepakatan dalam UUD 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Alat bukti yang sah dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yaitu analisis kualitatif. Dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menganalisa penerapan sistem dan prosedur pungutan retribusi parkir yang menjamin pemanfaatan untuk menjangkau Pendapatan Asli Daerah yang optimal, dengan memperhatikan :
  - a. Lokasi-lokasi parkir
  - b. Karcis retribusi parkir
  - c. Petugas pungutan retribusi parkir
2. Menganalisa penerapan pengendalian interen yang mencakup pengendalian umum yaitu pengendalian manajemen, pengendalian dokumentasi dan pengendalian transaksi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dari lokasi-lokasi yang dikelola oleh pengelola wilayah ini yang banyak terjadi tidak teratur penyetoran dari pengelola wilayah kepada badan pendapatan daerah dalam hal ini sub dinas retribusi, terdapat penyetoran tidak sesuai pendistribusian karcis (jumlah karcis yang digunakan), terjadi kurang harmonis antara pengelola wilayah dengan petugas pungutan yang ditugaskan oleh pengelola wilayah sehingga mengakibatkan tertundanya penyetoran pada waktu yang ditentukan. Yang merupakan daerah atau lokasi yang dikelola oleh wilayah yaitu parkir Saga Supermarket, Yohan Supermarket, Papua Supermarket, Mega Mall dan lainnya yang sistem penyetoran per bulan Dengan pembagian hasil pungutan retribusi parkir sebagai berikut, hasil pendapatan dari pengelola wilayah disetor kepada Badan pendapatan Daerah (Sub Dinas Retribusi) bagian penaguhan dan pencatatan sebesar 40% dan 60% untuk pengelola wilayah. Dari 60% ini pula akan dibayarkan gaji/upah bagi petugas pungutan retribusi parkir yang ditugaskan oleh pengelola wilayah . Karcis yang digunakan seringkali tidak diberikan kepada penggunaan lokasi parkir sehingga banyak beredar isu yang mencorag nama Badan Pendapatan Daerah Kota Sorong dan juga sebaliknya dari pengguna lokasi parkir. Yang biasanya menjadi perbincangan soal karcis yang digunakan ini terjadi di kendaraan umum (Taxi) pada penumpang yang menggunakan jasa angkutan umum. Yang terjadi di lokasi parkir, pada pengguna lokasi sering juga lalai dalam melakukan kewajibannya membayar retribusi parkir baik kendaraan roda empat maupun roda dua. Di setiap lokasi parkir baik yang dipungut langsung oleh Badan Pendapatan daerah maupun yang dipungut oleh pengelola

wilayah sering terjadi petugas yang sengaja tidak memberikan karcis parkir dan ada juga pengguna lokasi parkir yang tidak mengambil karcis. Pada kegiatan pungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Sorong, ada pula yang terjadi yang mengakibatkan setoran tidak sesuai target atau karcis yang diperhitungkan untuk satu hari bahkan lebih, tidak terpakai habis yaitu karena ada terjadinya demo, hujan sehari atau cuaca lain yang tidak mendukung. Salah satu ukuran keberhasilan daerah otonomi dapat dilihat dari kemampuan dalam pengelolaan keuangan daerah, pada peningkatan pendapatan asli daerah dan meningkatnya usaha-usaha pembangunan, retribusi parkir mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam peningkatan pengelolaan keuangan dan peningkatan usaha-usaha pembangunan dan juga pembiayaan urusan rumah tangga daerah karena retribusi parkir disusun dan dirangkakan dalam rencana / perencanaan target penerimaan retribusi daerah dan peruntukkan bagi daerah lainnya. Karena itu retribusi parkir merupakan bagian dari daerah lainnya yang tidak dapat dipisahkan. Retribusi parkir mempunyai pengaruh penting karena penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah

## **KESIMPULAN**

Belum ada penerapan sistem dan prosedur yang baik dari Badan pendapatan Daerah kota Sorong dalam pemungutan retribusi sehingga menyebabkan sering kali terjadi sistem pemungutan di area parkir menjadi tidak efektif. Tidak teratur penyetoran dari pengelola wilayah kepada Badan Pendapatan daerah atau sub dinas retribusi itu seperti penyetoran tidak sesuai pendistribusian karcis, kurang harmonis antara pengelola wilayah dengan petugas pungutan yang ditugaskan oleh pengelola wilayah sehingga mengakibatkan tertundanya penyetoran pada waktu yang ditentukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Baridwani, zaki. Sistim Informasi akuntansi, edisi II, Yogyakarta: BPFE, 1994
- Basu, Swastha. Manajemen penjualan, Edisi ke-3, Yogyakarta : BPFE, 1993
- Cushign, Barry E. Terj. Sistim Informasi akuntansi dan organisasi Perusahaan. Edisi ke-3, oleh Ruchyat Kosasih, Jakarta : Erlangga, 1991.
- Gushing, Barrt E. Sistim Informasi Akuntansi dan Informasi . Edisi ke- 3. Terjemahan Ruchyat Kosasih. Jakarta : Erlangga.

- Hogngren, Charles T. Ters. Pengantar Akuntansi Manajemen, Edisi Ke-3, Jilid II Ahli Bahasa Frederikson Saragih, Jakarta : Erlangga, 1993.
- Indra Bastian, Ph. D, MBA, AKT. Sistim akuntansi Sektor Publik, Edisi II.
- Jogiyanto, H.M. Joseph W. Sistim Akuntansi Berbasis Komputer. Jilid II. Yogyakarta : BPFE, 1993
- J. Supranto, M.A. Metode Riset dan Aplikasinya dalam Pemasaran, Edisi ke- VI. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1997
- Kolter, Philip dan Gary Armstrong, Trj. Dasar-dasar Pemasaran, Edisi ke- III. Jilid II, Ahli Bahasa Willhelinus W. Bakowatun, Jakarta : Intermedia, 1997
- Kasubag umum dan kepegawaian, Ruth. W. Solossa, S. sos, NIP. 197811302001122003
- Laporan Tahunan 1998 PR. United Tractor Tbk, Jakarta : PT. United Tractor Tbk, 1998
- Mulyadi, Sistim Akuntansi, Edisi III. Yogyakarta : Edisi III. Yogyakarta : STIEK YKPN, 1993
- Niko Isir, S.sos. Bidang Retribusi Daerah. NIP 197701042006051002
- Siegel, Joerg dan Joe K, Shim. Istilah Akuntansi, edisi I,II,III. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 1994.
- Sofyan Syafri, Harapan Budgeting : Perencanaan untuk membantu Manejemen. Cetakan ke – I, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995
- The Liang Gie. Pertumbuhan Daerah di Negri Republik Indonesia. 1968. Hal 168
- Usry, Milton F. dan Adolph Matz. Ters. Akuntansi biaya: Perencanaan dan pengendalian, edisi Ke-10, Jakarta: Erlangga, 1997
- Viale, J, David. Dasar-Dasar Manejemen Sedia. Terjemaan : Erlinda M. Nurson, Jakarta: PPM, 1993
- Willhelinus W. Bakowatun. Pesaran, edisi ke VI, Jilid II Jakarta : Intermedia, 1997
- Wajong. Adminisdtrasi Keuangan Daerah tahun 1976, hal. II